

PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**Fauzan Yudo Wicaksono**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
E-mail: fauzanyudo22@gmail.com**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi setiap negara. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin dan mengentaskan kemiskinan yang dialami masyarakat ekonomi rendah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis belanja modal dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; dan untuk mengetahui apakah belanja modal dan pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah sebesar 45 data dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis. Hasil dari penelitian ini yaitu; belanja modal dan pendidikan secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020; belanja modal dan pendidikan secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020; dan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel intervening pengaruh belanja modal dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020.

Kata kunci: *belanja modal, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan*

ABSTRACT

Economic growth and poverty is a problem faced by every country. Each country will try to achieve development success by increasing economic growth as much as possible and alleviating poverty experienced by low-income people. The objective of this research is to analyze capital expenditure and education on economic growth in the districts/cities of Bali Province; to analyze the effect of capital expenditure, education and economic growth on poverty in the Regency/City of Bali Province; and to find out whether capital spending and education have an indirect effect on poverty through economic growth in the districts/cities of the Province of Bali. The number of observations in this study amounted to 45 data with the method of collecting data through literature study. The analysis technique used in this study is Path Analysis. The results of this study are; capital expenditure and education do not directly affect economic growth in the Regencies/Cities of Bali Province in 2016-2020; capital expenditure and education have a direct and

significant negative effect on poverty in districts/cities of Bali Province in 2016-2020, while economic growth has not directly affected poverty in districts/cities of Bali province in 2016-2020; and economic growth is not an intervening variable for the effect of capital expenditure and education on poverty in the Regencies/Cities of Bali Province in 2016-2020.

Keywords: *government capital expenditure, education, economic growth, poverty*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi setiap negara. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin dan mengentaskan kemiskinan yang dialami masyarakat ekonomi rendah. Menurut Budhi (2013) Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sampai saat ini, namun nyatanya masih banyak penduduk dunia yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Menurut Margareni dkk. (2016) pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya. Masalah kemiskinan ini terutama dihadapi oleh negara berkembang (Vincent, 2009). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang termasuk salah satunya, banyak orang Indonesia hidup tidak jauh diatas garis kemiskinan (Yusuf dan Sumner, 2015). Menurut Suryahadi dkk (2012) kemiskinan di Indonesia sebagian besar terjadi di pedesaan. Saat ini sekitar 25,95 juta penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan. Orang miskin terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal disebut lingkaran setan (*vicious circle*) (Seran, 2017).

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai daerah tujuan wisata Bali memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dimana perekonomian Bali lebih baik dibandingkan pertumbuhan secara nasional pada periode yang sama, namun dibalik meningkatnya pertumbuhan ekonomi Bali saat ini masih saja terdapat masalah sosial seperti kemiskinan. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser, dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak

sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Wiradyatmika dan Sudiana, 2013). Tabel 1 menunjukkan persentase penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	5,33	5,38	5,20	4,88	4,51
Tabanan	5,00	4,92	4,46	4,21	4,27
Badung	2,06	2,06	1,98	1,78	2,02
Gianyar	4,44	4,46	4,19	3,88	4,08
Klungkung	6,35	6,29	5,86	5,40	4,87
Bangli	5,22	5,23	4,89	4,44	4,19
Karangasem	6,61	6,55	6,28	6,25	5,91
Buleleng	5,79	5,74	5,36	5,19	5,32
Denpasar	2,15	2,27	2,24	2,10	2,14
Provinsi Bali	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021*

Dapat dilihat dari Tabel 1, meskipun rata-rata penduduk miskin di Provinsi Bali yang berkisar antara 4,25 persen sampai 3,78 persen selama periode 2016-2020 lebih rendah dari rata-rata penduduk miskin Nasional yakni sebesar 10,78 persen sampai 9,32 persen pada periode yang sama, namun dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Bali tidak selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, padahal jumlah penduduk miskin seharusnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali tidak mengalami penurunan di tahun 2016 ke tahun 2017 yakni tetap diangka 4,25 persen, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 4,01 persen dan ditahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,22 persen menjadi 3,79 persen serta ditahun 2020 hanya terjadi sedikit penurunan yakni diangka 3,78 persen. Program pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan kecuali mengetahui siapa sebenarnya orang miskin itu. Keberadaan penduduk miskin dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan yang

dilaksanakan oleh suatu negara (Marhaeni dkk., 2014). Terlihat pada Tabel 2 bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali masih mengalami fluktuasi. Tabel 2 menunjukkan persentase Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	5,96	5,31	5,59	5,56	-4,96
Tabanan	6,14	5,38	5,71	5,59	-6,14
Badung	6,81	6,11	6,73	5,81	-16,52
Gianyar	6,31	5,50	6,01	5,61	-8,38
Klungkung	6,28	5,34	5,48	5,42	-6,35
Bangli	6,24	5,35	5,48	5,46	-4,10
Karangasem	5,92	5,08	5,44	5,50	-4,45
Buleleng	6,02	5,40	5,60	5,53	-5,76
Denpasar	6,51	6,08	6,42	5,82	-9,42
Provinsi Bali	6,32	5,59	6,31	5,60	-9,31

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021*

Menurut Tabel 2, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami penurunan di tahun 2016 ke tahun 2017 dari 6,32 persen menjadi 5,59 persen, selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 6,31 persen dan ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,60 persen serta ditahun 2020 terjadi penurunan kembali di angka -9,31 persen. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang mampu berdampak pada penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari meningkatnya pengeluaran pemerintah di sektor publik. Dengan meningkatnya pengeluaran di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk (Widodo dkk., 2011). Salah satu pengeluaran pemerintah di sektor publik yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta kemiskinan adalah pengeluaran infrastruktur pemerintah.

Menurut Suparno (2014) Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari belanja modal, yang

diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat (BPS, 2018:26). Hal ini sejalan dengan salah satu nawacita Jokowi. Dimana satu bidang yang pemerintah menunjukkan niat dan kemajuannya adalah infrastruktur (Ray dan Ing, 2016). Tabel 3 menyajikan data Realisasi Belanja Modal Provinsi Bali periode 2016-2020.

Tabel 3 Realisasi Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Modal				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	324,63	243,74	344,65	218,34	83,29
Tabanan	257,06	290,57	218,24	187,18	184,67
Badung	1.195,12	1.241,11	906,77	824,67	452,91
Gianyar	309,92	409,36	297,03	250,35	416,04
Klungkung	144,11	188,80	149,85	129,43	116,44
Bangli	250,23	158,61	181,20	151,26	57,14
Karangasem	190,44	237,07	144,91	152,23	81,58
Buleleng	345,15	295,22	204,31	274,88	259,44
Denpasar	257,67	251,63	258,41	293,70	95,13
Provinsi Bali	3.274,31	3.316,10	2.705,36	2.482,11	1.746,63

Sumber: *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2021*

Realisasi Belanja Modal Provinsi Bali pada tahun 2017 mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2016, namun pada tahun-tahun berikutnya yakni pada tahun 2018 hingga pada tahun 2020 selalu mengalami pengurangan. Selain pengeluaran pemerintah di sektor publik, dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia pendidikan juga turut andil didalamnya. Investasi dalam pendidikan akan lebih berarti bagi orang miskin daripada yang tidak miskin, karena untuk penduduk miskin aset utama adalah energi. Keberadaan fasilitas pendidikan yang murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas (Asmita dkk., 2017) hal ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal oleh pemerintah diharapkan bisa mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurut Halim (2002:72) belanja

modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas penunjang pelayanan publik. Peningkatan alokasi belanja modal dalam wujud aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk menunjang produktivitas perekonomian karena jika belanja modal tinggi maka produktivitas perekonomian semakin meningkat (Novita, 2012). Meningkatnya realisasi belanja modal akan meningkatkan produktivitas sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh pula dengan menurunnya kemiskinan.

Menurut Rahayu dan Trisnawati (2014) Tingkat pendidikan dapat berperan penting dalam menentukan pekerjaan, semakin tingginya pendidikan maka akan semakin layak ia mendapatkan pekerjaan. Hal ini yang mendasari kebanyakan orang tua yakin bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi proses perbaikan tingkat pendapatan. Makin baik kualitas pendidikan, maka makin besar pula harapan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang (Kurniawan, 2016). Tabel 4 menyajikan data rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2016-2020.

Tabel 4 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Tahun Sukses)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	7,59	7,62	7,95	8,22	8,23
Tabanan	8,10	8,43	8,64	8,87	8,88
Badung	9,90	9,99	10,06	10,38	10,39
Gianyar	8,86	8,87	8,92	8,94	9,04
Klungkung	7,06	7,46	7,75	8,12	8,13
Bangli	6,44	6,80	7,13	7,16	7,17
Karangasem	5,48	5,52	5,97	6,31	6,32
Buleleng	6,85	7,03	7,04	7,08	7,24
Denpasar	11,14	11,15	11,16	11,23	11,47
Provinsi Bali	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021*

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali sebesar 8,55 tahun, lebih tinggi 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 8,36 tahun. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan hingga yang tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 8,95 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia ≥ 15 tahun di Provinsi Bali telah menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertamanya.

Tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu peranan penting dalam membentuk kemampuan sumber daya manusia dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Hal ini dapat dilihat dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah melihat Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Semakin tinggi angka RLS, maka semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah (Mauludin, 2020).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ; 1) untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; 2) untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; 3) untuk mengetahui apakah belanja modal dan pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Obyek penelitian ini adalah belanja modal, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan dari dua karakteristik data yaitu cross section dan time series. Adapun jumlah data *cross section* sebanyak 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan data time series sebanyak 5 tahun yang di mulai dari tahun 2016-2020. Dengan demikian jumlah pengamatan dalam penelitian ini

adalah sebesar 45 data yang dikumpulkan dari data variabel yang dibutuhkan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali serta literatur-literatur lain yang mendukung objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, *path analysis*, dan uji pengaruh langsung dan uji pengaruh tidak langsung Teknik analisis jalur (*path analysis*) merupakan teknik analisis yang digunakan dalam menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Path analysis berguna untuk memperlihatkan dan menguji model keterkaitan yang berbentuk sebab akibat antar variabel (Suyana Utama, 2012). persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan konsep dapat dilihat anak panah b_1 menunjukkan pengaruh langsung variabel X_1 terhadap Y_1 . Pada anak panah b_2 menunjukkan pengaruh langsung variabel X_2 terhadap Y_1 . Pada anak panah b_3 menunjukkan pengaruh langsung X_1 terhadap Y_2 . Anak panah b_4 menunjukkan pengaruh langsung variabel X_2 terhadap Y_2 . Anak panah b_5 menunjukkan pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_2 . Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$e_i = \sqrt{(1 - R_i^2)} \dots\dots\dots(3)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - e_1^2 e_2^2 \dots\dots\dots(4)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap R_m^2 sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Analisis Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimu</i>	<i>Maximu</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Belanja Modal	45	57,14	1241,11	300,5442	256,12491
Pendidikan	45	5,48	11,47	8,2687	1,60430
Pertumbuhan Ekonomi	45	-16,52	6,81	3,1649	5,57504
Kemiskinan	45	1,78	6,61	4,4833	1,46738
<i>Valid N (listwise)</i>	45				

Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa untuk variabel infrastruktur memiliki nilai minimum sebesar 57,14 milyar rupiah dan nilai maksimum sebesar 1241,11 milyar rupiah dengan nilai rata-rata tahun 300,5442 milyar rupiah serta standar deviasi sebesar 256,12491 rupiah. Variabel pendidikan memiliki rata-rata minimal sekolah dengan nilai minimum yaitu 5,48 tahun dan nilai maksimum sebesar 11,47 tahun dengan nilai rata-rata sebesar 8,2687 tahun dan standar deviasi sebesar 1,60430 tahun. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum yaitu -16,52 persen dan nilai maksimum sebesar 6,81 persen dengan nilai rata-rata sebesar 3,1649 persen dan standar deviasi sebesar 5,57504 persen. Variabel kemiskinan memiliki nilai minimum yaitu 1,78 persen dan nilai maksimum sebesar 6,61 persen dengan nilai rata-rata sebesar 4,4833 persen dan standar deviasi sebesar 1,46738 persen.

Deskripsi variabel belanja modal

Belanja modal adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang direalisasikan untuk Belanja Modal. Dalam penelitian ini menggunakan data realisasi belanja modal tahun 2016-2020 Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dalam satuan milyar rupiah. Data variabel infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Realisasi Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Modal				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	324,63	243,74	344,65	218,34	83,29
Tabanan	257,06	290,57	218,24	187,18	184,67
Badung	1.195,12	1.241,11	906,77	824,67	452,91
Gianyar	309,92	409,36	297,03	250,35	416,04
Klungkung	144,11	188,80	149,85	129,43	116,44
Bangli	250,23	158,61	181,20	151,26	57,14
Karangasem	190,44	237,07	144,91	152,23	81,58
Buleleng	345,15	295,22	204,31	274,88	259,44
Denpasar	257,67	251,63	258,41	293,70	95,13
Provinsi Bali	3.274,31	3.316,10	2.705,36	2.482,11	1.746,63

Sumber: Sumber : *Hasil Olahan Data, 2022*

Berdasarkan Tabel 6, dilihat mengenai data realisasi belanja modal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020 dalam satuan milyar rupiah. Dari data pada Tabel 4.2 nilai realisasi belanja modal paling tinggi terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Badung dengan nilai 1.241,11 milyar rupiah. Nilai realisasi belanja modal paling rendah terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Bangli dengan nilai 57,14 milyar rupiah. Data realisasi belanja modal di Provinsi Bali selalu mengalami fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Deskripsi variabel pendidikan

Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam penelitian ini menggunakan data rata-rata lama sekolah tahun 2016-2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dalam satuan tahun sukses. Data dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Tahun Sukses)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	7,59	7,62	7,95	8,22	8,23
Tabanan	8,10	8,43	8,64	8,87	8,88
Badung	9,90	9,99	10,06	10,38	10,39
Gianyar	8,86	8,87	8,92	8,94	9,04
Klungkung	7,06	7,46	7,75	8,12	8,13
Bangli	6,44	6,80	7,13	7,16	7,17
Karangasem	5,48	5,52	5,97	6,31	6,32
Buleleng	6,85	7,03	7,04	7,08	7,24
Denpasar	11,14	11,15	11,16	11,23	11,47
Provinsi Bali	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95

Sumber: Sumber : *Hasil Olahan Data, 2022*

Berdasarkan Tabel 7, disajikan data rata-rata lama sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020 dalam satuan tahun sukses. Rata-rata lama sekolah dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 di Kota Denpasar dengan rata-rata lama sekolah 11,47 tahun. Rata-rata lama sekolah dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Karangasem dengan nilai 5,48 tahun. Untuk data rata-rata lama sekolah menurut di Provinsi Bali jika dilihat pada Tabel 4.3 selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 dengan nilai 8,36 tahun hingga pada tahun 2020 dengan nilai 8,95 tahun.

Deskripsi variabel pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara dari tahun ke tahun dinyatakan dalam persen. Pertumbuhan ekonomi dikatakan positif apabila persentase laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dalam satuan persen. Data variabel pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	5,96	5,31	5,59	5,56	-4,96
Tabanan	6,14	5,38	5,71	5,59	-6,14
Badung	6,81	6,11	6,73	5,81	-16,52
Gianyar	6,31	5,50	6,01	5,61	-8,38
Klungkung	6,28	5,34	5,48	5,42	-6,35
Bangli	6,24	5,35	5,48	5,46	-4,10
Karangasem	5,92	5,08	5,44	5,50	-4,45
Buleleng	6,02	5,40	5,60	5,53	-5,76
Denpasar	6,51	6,08	6,42	5,82	-9,42
Provinsi Bali	6,32	5,59	6,31	5,60	-9,31

Sumber: Sumber : *Hasil Olahan Data, 2022*

Berdasarkan Tabel 8, disajikan data pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020 yang diukur dalam satuan persen. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Badung dengan nilai 6,81 persen dan pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Badung dengan nilai yang mencapai -16,52 persen. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif yang cenderung penurunan. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat paling terlihat terjadi pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali menyentuh angka -9,31. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi yang mengakibatkan seluruh kegiatan perekonomian terhambat yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Deskripsi variabel kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok. Dalam penelitian ini menggunakan data persentase penduduk miskin tahun 2016-2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dalam satuan persen. Data kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	5,33	5,38	5,20	4,88	4,51
Tabanan	5,00	4,92	4,46	4,21	4,27
Badung	2,06	2,06	1,98	1,78	2,02
Gianyar	4,44	4,46	4,19	3,88	4,08
Klungkung	6,35	6,29	5,86	5,40	4,87
Bangli	5,22	5,23	4,89	4,44	4,19
Karangasem	6,61	6,55	6,28	6,25	5,91
Buleleng	5,79	5,74	5,36	5,19	5,32
Denpasar	2,15	2,27	2,24	2,10	2,14
Provinsi Bali	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78

Sumber: Sumber : *Hasil Olahan Data, 2022*

Berdasarkan Tabel 9, disajikan data persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. Data kemiskinan dengan presentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Karangasem dengan nilai 6,61 persen. Presentase data kemiskinan yang terendah terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Badung pada tahun 2019 dengan nilai 1,78 persen. Data kemiskinan di Provinsi Bali dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dimulai dari angka 4,25 persen pada tahun 2016 dan 3,78 persen pada tahun 2020.

Analisis Data

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square - OLS*) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) terhadap model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

Persamaan I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

X_1 = belanja modal

X_2 = pendidikan

Y_1 = pertumbuhan ekonomi

Y_2 = kemiskinan

$\beta_1 \dots \beta_5$ = koefisien jalur untuk masing-masing variabel

e_1, e_2 = kesalahan residual (*error*)

1) Pengaruh pengaruh belanja modal dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Pengujian persamaan 1 dilakukan untuk melihat pengaruh belanja modal dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali secara langsung yang dilakukan dengan program SPSS maka hasil persamaan regresi disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 0,006 X_1 - 0,912 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(17)$$

Persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel belanja modal dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,006 dan nilai signifikansi 0.082 > 0,05 menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan atau infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pendidikan dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,912 dan nilai signifikansi 0.112 > 0,05 menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan atau variabel pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Pengaruh belanja modal, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat infrastruktur, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS maka hasil persamaan regresi disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = -0,001X_1 - 0,739X_2 + 0,024 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(18)$$

Persamaan 2 menunjukkan bahwa variabel belanja modal dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,001 dan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pendidikan dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar $- 0,739$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar $0,024$ dan nilai signifikansi $0.080 > 0,05$ menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan atau pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan.

Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 maka dapat dilihat dan dibuat ringkasan koefisien jalur dan signifikansi hubungan antar variabel seperti yang disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10 Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel

Regresi	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>P. Value</i>	Keterangan
X1 → Y1	0,006	0,082	Tidak Signifikan
X2 → Y1	-0,912	0,112	Tidak Signifikan
X1 → Y2	-0,001	0,000	Signifikan
X2 → Y2	-0,739	0,000	Signifikan
Y1 → Y2	0,024	0,080	Tidak Signifikan

Sumber : Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar

Mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variance variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh infrastruktur dan pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,089} = 0,954$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh infrastruktur, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi maka dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,901} = 0,0315$$

Pemeriksaan Validitas Model

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut :

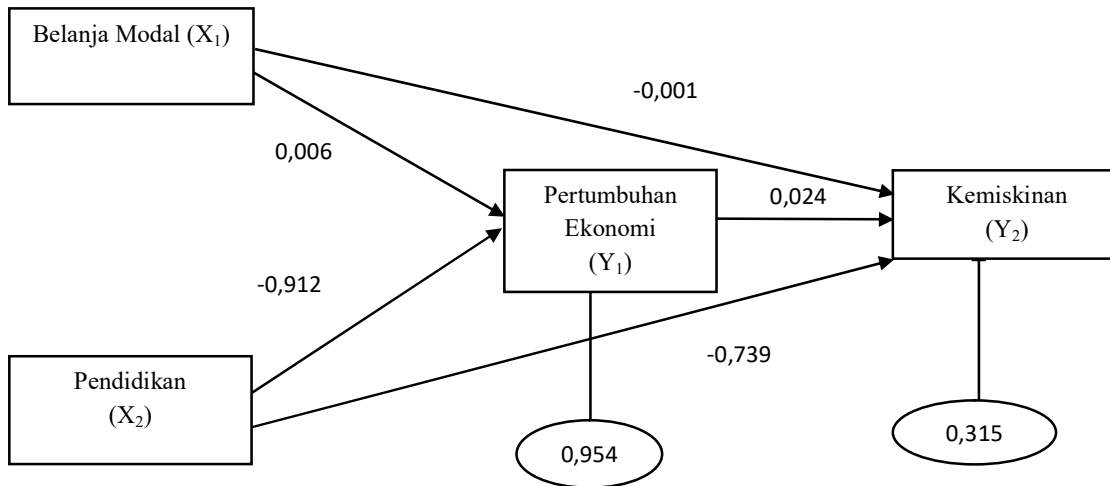
$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,954)^2 (0,315)^2 \\ &= 1 - (0,910116) (0,099225) \\ &= 1 - 0,0903 \\ &= 0,9097 \end{aligned}$$

Keterangan :

R^2_m : Koefisien determinasi total

e_1, e_2 : Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,9097 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 90,97 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 9,03 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.



Gambar 1 Diagram Hasil Analisis Jalur

Pengujian Hasil Hipotesis

Pengujian Pengaruh Langsung

- 1) Pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel belanja modal (X_1) dengan koefisien regresi sebesar 0,006 dan probabilitas 0,082 > alpha 0,05, sehingga berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suswita, dkk (2020) dengan penelitian yang berjudul pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa meningkatnya realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi pada tahun 2016 sampai 2020 tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi

pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perencanaan realisasi belanja modal pemerintah difokuskan dalam penanggulangan pandemi. Hal ini tentunya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dibuktikan dengan data pertumbuhan ekonomi yang menurun di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2020.

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, kemudian pelaksanaan, baru dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian belanja modal untuk pembangunan tidak selalu langsung dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian, seperti pembelian tanah untuk aset daerah, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga harus menunggu untuk dibangun sarana dan prasarana baru dapat di gunakan.

2) Pengaruh langsung pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel pendidikan (X_2) dengan koefisien regresi sebesar $-0,912$ dan probabilitas $0,112 > \alpha 0,05$, sehingga berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan atau variabel pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa dilakukan oleh Harahap (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi artinya semakin tinggi rata-rata lama sekolah tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena perbedaan atau tidak meratanya jumlah orang yang menamatkan jenjang pendidikan antar Kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2016 hingga 2020.

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah belum menjamin berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan dengan banyaknya lulusan atau tamatan

sekolah yang belum atau tidak bekerja dikarenakan banyak lulusan yang mencari pekerjaan sesuai bidang yang tekuni. Hal ini tentunya mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi, meskipun lama sekolah tinggi. Adanya hal semacam ini yang menyebabkan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada tahun 2016 hingga 2020.

Variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang memiliki pendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani suatu pekerjaan yang sama. Pelatihan yang dapat membah skill perlu di adakan guna memberikan tambahan pengetahuan untuk tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Hal tersebut diberikan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan semakin banyak pula masyarakat yang skillnya. Kondisi semacam ini juga terjadi di Provinsi Bali dimana tingginya tingkat pendidikan belum menjamin meningkat pula pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pendidikan formal sering kali hanya fokus pada hard skill yang tentunya masyarakat harus meningkatkan soft skill sehingga dapat lebih produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3) Pengaruh langsung belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel belanja modal (X_1) dengan koefisien regresi sebesar $-0,001$ dan probabilitas $0,000 < \alpha 0,05$, sehingga berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan kemiskinan (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti meningkatnya belanja modal pemerintah maka akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Priyarsono (2012) yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur dengan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dkk., (2017) juga mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Infrastruktur dalam penelitian ini adalah belanja modal yang digunakan untuk pembelian /pembentukan aset tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan aset tetap lainnya. Meningkatnya infrastruktur maka

akan mendorong percepatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Pada penelitian ini meningkatnya belanja modal diikuti dengan penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2019-2020.

4) Pengaruh langsung pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel pendidikan (X_2) dengan koefisien regresi sebesar $-0,739$ dan probabilitas $0,000 < \alpha 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti ketika meningkatnya rata-rata lama sekolah maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

. Menurut Awan dkk, (2011) tingkat pendidikan dapat mengurangi kemungkinan penduduk menjadi miskin, dengan kata lain pendidikan berdampak negatif terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Njong (2010) yang meneliti pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan di Kamerun. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa memang tingkat pendidikan memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Secara teoritis, semakin tinggi pengetahuan atau semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi kemampuan orang untuk berpikir, semakin baik kemampuan untuk melakukan sesuatu, semakin tinggi kemampuan untuk memecahkan masalah. Pendidikan memungkinkan orang untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam berbagai kegiatan termasuk produksi dan, karenanya, mencapai pendapatan yang lebih tinggi (Paulus, Tri dan Sri, 2017).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pendidikan naik maka kemiskinan akan semakin menurun. Meningkatnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2016-2020 diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan dengan adanya pendidikan yang meningkat, maka keterampilan dan keahlian akan meningkat pula. Semakin tingginya pendidikan maka peluang orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akan semakin tinggi yang mengakibatkan penurunan angka kemiskinan.

5) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa secara langsung variabel pertumbuhan ekonomi (Y1) dengan koefisien regresi sebesar 0,024 dan probabilitas $0,080 > \alpha 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan atau variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Romi (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018) menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016). Ini berarti, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi kemiskinan. Kemungkinan terjadi arus keuangan dan pendapatan dalam perekonomian di Provinsi Bali yang hanya mengalir pada golongan masyarakat berpendapatan menengah ke atas atau dengan kata lain terjadi ketidakmerataan pendapatan.

Agar pertumbuhan ekonomi menjadi strategi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, harus disertai kebijakan deliberasi redistribusi pendapatan. Strategi pertumbuhan haruslah ditargetkan pada masyarakat miskin, dibutuhkan investasi yang lebih banyak pada modal sumber daya manusia. Sektor pertanian seharusnya mendapat perhatian yang lebih banyak. Selain itu perlu diperhatikan adanya pembangunan perekonomian yang berkualitas dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku atau pemain dari pembangunan perekonomian di daerah tersebut. Kemajuan jaman yang banyak menggunakan teknologi dan dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja harus perlu dievaluasi. Jika pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Pengujian Pengaruh Tidak langsung

- 1) Pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020 melalui pertumbuhan ekonomi.

a) Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 \cdot \beta_5 = 0$, pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel intervening pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020

$H_1 : \beta_1 \cdot \beta_5 \neq 0$, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020

- b) Tingkat signifikan atau taraf nyata 5% dan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$).

c) Kriteria pengujian

Jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

d) Perhitungan

Membandingkan $Z_{hitung} X_1$ dengan Z_{tabel}

Statistik Uji

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_1}^2 + b_1^2 S_{b_5}^2}$$

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{(0,024)^2 (0,004)^2 + (0,006)^2 (0,014)^2}$$

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{0,000000009216 + 0,000000007056}$$

$$S_{b_1b_5} = 0,0001275617497$$

Keterangan :

$S_{b_1b_5}$ = besarnya standar *error* tidak langsung

S_{b_1} = standar *error* koefisien b_1

S_{b_5} = standar *error* koefisien b_5

b_1 = jalur X_1 terhadap Y_1

b_5 = jalur Y_1 terhadap Y_2

b_1b_5 = jalur X_1 terhadap $Y_1(b_1)$ dengan jalur Y_1 terhadap $Y_2(b_5)$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien b_1b_7 dengan rumus sebagai berikut.

$$Z_{hitung} = \frac{b_1b_5}{S_{b_1b_5}} = \frac{(0,006).(0,024)}{0,0001275617497} = 1,1288650$$

$$Z_{tabel} = \alpha/2 = 0,05/2 = 0,025 (0,02 ; 0,005) = 1,96$$

$$Z_{hitung} X_1 1,1288650 < Z_{tabel} 1,96$$

e) Simpulan

Oleh karena z hitung sebesar $1,1288650 < 1,96$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) bukan sebagai variabel intervening pengaruh belanja modal (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020

2) Pengaruh tidak langsung pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020 melalui pertumbuhan ekonomi.

a) Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_2.\beta_5 = 0$, pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel intervening pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020.

$H_1 : \beta_2.\beta_5 \neq 0$, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020.

b) Tingkat signifikan atau taraf nyata 5% dan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$).

c) Kriteria pengujian

Jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

d) Perhitungan

Membandingkan $Z_{hitung} X_2$ dengan Z_{tabel}

Statistik Uji

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_2}^2 + b_2^2 S_{b_5}^2}$$

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{(0,024^2)(0,562^2) + (-0,912^2)(0,014^2)}$$

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{0,316583021824}$$

$$S_{b_2b_5} = 0,5626571085696$$

Keterangan :

Sb2b5 = besarnya standar *error* tidak langsung

Sb2 = standar *error* koefisien b2

Sb5 = standar *error* koefisien b5

b2 = jalur X₂ terhadap Y₁

b5 = jalur Y₁ terhadap Y₂

b2b5 = jalur X₂ terhadap Y₁(b2) dengan jalur Y₁ terhadap Y₂(b5)

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien b₂b₅ dengan rumus sebagai berikut.

$$Z_{hitung} = \frac{b_2 b_5}{S_{b_2 b_5}} = \frac{(-0,912) \cdot (0,024)}{0,5626571085696} = -0,019389386684$$

$$Z_{tabel} = \alpha/2 = 0,05/2 = 0,025 \text{ (0,02 ; 0,005)} = 1,96$$

$$Z_{hitung} X_2 -0,019389386684 < Z_{tabel} 1,96$$

e) Simpulan

Oleh karena z hitung sebesar $-0,019389386684 < 1,96$ maka H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya pertumbuhan ekonomi (Y₁) bukan sebagai variabel intervening pengaruh pendidikan (X₂) terhadap kemiskinan (Y₂) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020

Tabel 11 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Belanja Modal, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	
X ₁ → Y ₁	0,006	-	0,006
X ₂ → Y ₁	-0,912	-	-0,912
X ₁ → Y ₂	-0,001	1,1288650	1,127865
X ₂ → Y ₂	-0,739	-0,019389386684	-0,758389387
Y ₁ → Y ₂	0,024	-	0,024

Sumber : Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut; 1) belanja modal dan pendidikan secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020; 2) belanja modal dan pendidikan secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020; 3) pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel intervening pengaruh belanja modal dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2016-2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa saran yaitu: 1) untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali harus merencanakan realisasi belanja modal dengan tepat sasaran agar mendorong meningkatnya infrastruktur yang mana infrastruktur merupakan salah satu tombak awal dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sehingga kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan semakin menurun; 2) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali harus menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentunya dapat menstimulus lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat baik dengan pendidikan yang tinggi maupun yang rendah dapat terserap; 3) pendidikan yang tinggi belum menjamin mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Masyarakat harus berani keluar dari zona nyaman di dunia kerja, sehingga tidak terjadi pengangguran dan menyebabkan kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Masyarakat harus berani untuk masuk dalam dunia kerja bahkan di era sekarang masyarakat harus lebih berani untuk berwirausaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga menurunkan kemiskinan di Provinsi Bali serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi 2020. Katalog BPS*. Indonesia.
- Harahap. Erni Febrina, Rezka Yoli Amanda. 2022. Analisis Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Angkatan Kerja, Dan Pmdn Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*. Volume 10, Nomor 2 Hal : 132-138.

- Kurniawan, Jarot. 2016. Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1). Hal: 59-67.
- Mardiana., Theresia Militna dan Anis Rachma Utary. 2017. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *INOVASI*, 13(1). Hal: 50-60.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama., I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa. 2016. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 12(1). Hal: 101-110.
- Ningsih, Desrini , Puti Andiny. 2018. Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, VOL. 2, NO. 1. Hal. 53-61.
- Njong, Aloysius Mom. 2010. The Effects of Educational attainment on poverty reduction in Cameroon. *Journal of Education Administration and Policy Studies*, 2(1). Hal: 001-008.
- Nugraheni, Diyah dan D.S Priyarsono. 2012. Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(2). Hal: 148-167.
- Paulus Kindangen, Tri O. Rotinsulu dan Sri Murni (2017) Human Resource Quality and Household Income In North Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Innovation and Economic Development*. Volume 3, Issue 5, December 2017, page 26-37
- Putri, Irena Ade, Yoyok Soesatyo. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Volume 4 No 3. Hal. 1-7
- Putri, Nurul Septiyani Eka, dan Arif Pujiyono. 2017. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *PhD diss.*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rahayu, Shabrina Umi dan Ni Made Tisnawati. 2014. Analisis Pendapatan Keluarga Wanita Single Parent (Studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2). Hal: 83-89.
- Ray, David dan Lili Yan Ing. 2016. Addressing Indonesia's Infrastructure Deficit. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(1). Hal: 1-25.
- Romi, Syahrur, Etik Umiyati. 2018. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol. 7. No.1. Hal 1-7
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1). Hal: 59-71.
- Sharp et al. (Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes , P.W. 2000, *Economics of Social Issues 14th edition*, New York: Irwin/McGraw-Hill.

- Sofilda, Eleonora., Muhammad Zilal Hamzah, Arip Syaman Sholeh. 2013. Human Development and Poverty In Papua Province. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 6(6). Hal: 52-62.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyowati, Niken. 2013. The Effect of Educational , Health Infrastructure Expenses of the Workforce Employment and Poverty. *International Journal of Administrative Science and Organization*, 20(3). Hal: 122-128.
- Suparno, Heri. 2014. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomika Bisnis*, 5(1). Hal: 1-22
- Suryahadi, Asep., Gracia Hadiwidjaja dan Sudarno Sumarto. 2012. Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after the asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2). Hal: 209-227.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy
- Suswita, Intan, Darwin Damanik, Pawan Darasa Panjaitan. 2020. Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No. 1, Hal. 1-11.
- Suyana., Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Vincent, Brian. 2009. The Concept 'Poverty' towards Understanding in the context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty' : with some Comparative Evidence on Britain. *Journal of sustainable Development*, 2(2). Hal: 3-13.
- Widodo, Adi., Waridin, dan Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal dinamika ekonomi pembangunan*, 1(1). Hal: 25-42.
- Wiradyatmika, A.A Gde Alit., dan I Ketut Sudiana. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(6). Hal: 344-349.
- Wulandari, Fransiska Hastin. 2016. Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Indonesia Tahun 2008-2012. *Tesis*. Universitas Adma Jaya Yogyakarta.
- Yusuf, Arief Anshory dan Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 51(3). Hal: 323-348.